

## STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM KANG PISMAN DI KOTA BANDUNG

Danil Julio Sitompul<sup>1</sup> & Bambang Shergi Laksmono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia  
Correspondence Author: daniljuls@gmail.com

### ABSTRACT

*Community participation is an integrated part of collaborative governance. With collaborative governance, it can increase community participation in regional development and realize social welfare. The waste problem in the city of Bandung is caused by the low level of community participation in reducing waste in households and in the informal sector. So, a strategy is needed to increase community participation in the Kang Pisman program in Bandung City to increase public awareness in managing waste. The aim of this research is to see the strategy for increasing community participation in the Kang Pisman program in the city of Bandung by looking at 4 strategies through collaborative governance, community development, circular economy and digital-based governance approaches through waste processing. The research method used is qualitative with a descriptive research type as stated by Newman (2016). The results of this research indicate that the Strategy for Increasing Community Participation in the Kang Pisman program in Bandung City is going well. The strategy to increase community participation is not only influenced by the policies of the Kang Pisman program which uses a community development approach, but there are also triggering factors from the circular economy, increasing collaborative governance and socialization using digital.*

**Keyword:** *Participation, Collaborative Governance, Community Development*

### PENDAHULUAN

Urusan wajib pelayanan dasar nasional dalam ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih tergolong rendah, khususnya pada bidang Sanitasi. Dan yang menjadi fokus adalah sub bidang persampahan. Pada Tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jumlah sampah yang terkelola di Indonesia sebesar 72,95%, capaian ini sudah mendekati target nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu 100% sampah terkelola dan untuk capaian sanitasi layak rata-rata nasional adalah sebesar 80,29%.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Paradigma sampah yang semula hanya dibuang ke TPA saat ini ditransformasi menjadi paradigma baru pengelolaan sampah. Terkait Pengelolaan Sampah berbunyi, bahwa sampah itu menjadi sumber daya. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah.

Selama ini, masyarakat hanya berfikir praktis dan tidak memikirkan bagaimana cara memilah sampah dan mengolahnya di sumber sebelum dibuang. Masyarakat selama ini hanya berpikir pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah mulai dari pemilahan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan sampah. Beberapa inovasi pengolahan sampah berfokus pada optimalisasi kinerja TPA dengan menerapkan teknologi *waste to energy*. Konsep *waste to energy*

merupakan pemanfaatan sampah menjadi energi dengan sistem termal (Insenerator, Gasifikasi dan Pirolisis).

Di dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mengurangi timbulan sampah dengan program *waste to food*. Program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah melalui kegiatan pemilahan sampah dari sumber. Upaya ini telah menjadi *lesson learned* daerah lain untuk menerapkan kegiatan *waste to food*. Tetapi, semakin banyak wilayah yang melaksanakan kegiatan *waste to food*, belum diikuti dengan partisipasi masyarakatnya. Pembiayaan pemerintah hanya fokus terhadap sarana dan prasarana dari pengelolaan sampah dan juga infrastruktur TPA bukan kepada perubahan pola pikir. Permasalahan pertama dan utama adalah perubahan pola pikir dan faktor perilaku manusia terhadap sampah. Pemanfaatan teknologi pengolahan sampah adalah yang terakhir setelah perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran untuk memilah sampah. Pembangunan TPA sebagai solusi sepertinya telah membentuk pola pikir dan kebiasaan hidup instan untuk membuang sampah, tidak mau peduli terhadap lingkungan, dan hanya mengandalkan pemerintah.

Paradigma baru pengolahan sampah menjadikan sampah mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dijadikan briket batu bara, kerajinan tangan, tas belanja, rumah bakteri untuk menyaring air limbah rumah tangga dan kompos. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu sampai ke hilir, yaitu dari pengumpulan sampah pemilahan sampah di sumber sampai menjadikan sampah terpilah baik organik maupun anorganik menjadi produk siap pakai untuk bisa dimanfaatkan dan dijual ke masyarakat. Pandangan baru terhadap pengelolaan sampah tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendaur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Berdasarkan data dari SIPSN Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat berada di peringkat keempat dengan jumlah timbulan sampah terbesar di Indonesia sebesar 1,11 juta Ton. Salah satu penyumbang sampah terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kota Bandung dengan timbulan sampah sebesar 1.529 ton per hari dengan rincian jumlah sampah organik sebesar 736,76 meter kubik per harinya dan sampah anorganik dikelola melalui bank sampah. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kota Bandung mengalami kenaikan timbulan sampah yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2022. Ditambah lagi permasalahan bertambahnya jumlah penduduk, maka angka timbulan sampah juga akan semakin tinggi pada suatu kota. Sebagai Kota dengan jumlah penduduk yang cukup padat, Kota Bandung berada di posisi kedua terbesar di provinsi Jawa Barat sebanyak 3.718.660, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,99 persen, dan jumlah kepadatan penduduk sebesar 14.577 penduduk per kilometer. Dengan kepadatan penduduk yang semakin tinggi maka pengelolaan sampah yang kurang memadai akan berdampak pada berbagai aspek, seperti; lingkungan, estetika, kesehatan manusia, serta dapat memberikan dampak lanjutan yang berujung pada menurunnya pertumbuhan ekonomi. Selain menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan, Sampah tidak tertangani yang masuk ke badan sungai akan menyumbat saluran air dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Di sisi lain, pencegahan banjir dengan pengerukan sampah pada saluran air pun menelan biaya yang cukup tinggi terutama bagi kota-kota yang berada di pesisir dimana sampah akan bermuara sehingga berpotensi dan menghambat tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Bapak Walikota Oded M. Danial, telah menerjemahkan arahan tersebut dengan meluncurkan program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk mengurangi sampah di sumber dan meningkatkan peran serta dari masyarakat dalam mengelola sampah serta menciptakan kegiatan *circular economy*. Program ini diluncurkan dengan menerapkan program pengurangan sampah di sumber sampah, pemilahan sampah dan pengolahan sampah sedekat mungkin dari sumber/dalam Kawasan. Agar Pengelolaan sampah dapat berjalan secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan serta beroorientasi pada pengurangan sampah sejak dari sumber, maka diperlukan *sifting* atau pergeseran Kawasan bebas sampah dari Gerakan menjadi sebuah sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir berdasarkan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS) yang telah disusun dan diadaptasikan pada kondisi dan potensi wilayah lokal. Sebanyak 7 Kelurahan di Kota Bandung telah menjadi Kelurahan percontohan dalam hal pengelolaan sampah. Kelurahan tersebut adalah Kelurahan Sarijadi, Kelurahan Cisantren Kulon, Kelurahan Pasir Jati, Kelurahan Antapani Tengah, Kelurahan Batununggal, Kelurahan Cihaurgeulis, dan Kelurahan Sukamiskin.

Dengan sudah berjalannya program Kang Pisman dari tahun 2018, Kota Bandung telah meraih beberapa penghargaan. Pada tahun 2022 Kota Bandung meraih Penghargaan Adipura dengan kategori Kota Metropolitan dengan pengelolaan sampah terbaik dan kategori Hutan Kota terbaik yakni Hutan Kota Babakan Siliwangi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan tersebut membuktikan bahwa Kota Bandung merupakan kota terbaik untuk mengelola sampah di Jawa Barat.

Selain itu, Bapak Wali Kota Bandung juga telah menerbitkan Peraturan daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah yang mengatur pengolahan sampah terintegrasi dari hulu sampai hilir dan infrastruktur pengolahan sampah seperti TPA dan TPST menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Sebagaimana diamanatkan juga dalam undang-undang nomor 18 Tahun 2008 pasal 3 bahwa Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komperhensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, yang berlandaskan asas kebersamaan, asas keselamatan, asas kemanan dan asas nilai ekonomi. Di dalam program Kang Pisman terdapat suatu konsep yang disebut *circular economy* yang telah memenuhi asas ekonomi. Karena di dalam konsep tersebut dapat memanfaatkan sumber daya dari sampah dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kesejahteraan sosial.

Selain *circular economy*, *collaborative governance* menjadi isu penting juga dalam peningkatan partisipasi masyarakat karena dapat menciptakan *community development* yang disebut Kawasan Bebas Sampah. Pada akhirnya program ini tidak akan berhasil tanpa adanya sosialisasi dan edukasi melalui media sosial dengan pendekatan *governance* berbasis digital. Keberhasilan usaha pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan partisipasi masyarakat melalui program Kang Pisman mendorong peneliti untuk melihat bagaimana proses peningkatan partisipasi yang telah dilakukan dari Program Kang Pisman melalui pendekatan *collaborative governance*, *community development*, *circular economy*, dan pendekatan *governance* berbasis digital.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Neuman (2014) mengungkapkan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan induktif, dimana peneliti mengukur dan membuat konsep baru secara bersamaan dengan pengumpulan data. Konseptualisasi dilakukan sebagai proses pembentukan definisi teoritis yang koheren. Memberikan gambaran secara rinci berjalanya suatu program dan tidak hanya terfokus pada keluaran atau hasilnya saja, Patton (2009) menekankan agar suatu program yang berjalan tidak hanya terfokus pada keluaran atau hasilnya saja, namun juga harus bisa melihat proses yang dijalankan hingga program tersebut dianggap berhasil. Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif agar tujuan penelitian dalam menganalisis dan mendeskripsikan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kang pisman di Kota Bandung.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, dimana penelitian secara detail memberikan penyajian terkait latar hubungan sosial dan juga detail situasinya dilapangan (Neuman, 2014). Pada (Padget, 2017) menyatakan bahwa deskripsi yang lebih dalam bisa didapatkan berdasarkan pada riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya dengan penyempunaan ide, pengembangna konseptual yang bersifat deskriptif.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan Visi dan Misi Bapak walikota Bandung yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023 salah satu isu strategis Kota Bandung berkaitan dengan Lingkungan Hidup adalah menciptakan Lingkungan Hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan dan merupakan gambaran visi dan misi bapak walikota dalam bidang persampahan. Ini artinya bapak Oded M.Danial selaku walikota Bandung semenjak pertama kali menjabat sudah sangat peduli terhadap permasalahan persampahan. Hal ini juga tergambar dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 maupun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022. Selain itu di dalam dokumen Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) persampahan maupun dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) juga sudah menggambarkan terkait pengelolaan sampah di Kota Bandung untuk jangka Panjang. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pada tahun 2018 Bapak Oded M. Danial menciptakan gerakan program yang dinamakan Kang Pisman yaitu kepanjangan Kurangi Pisahkan dan Manfaatkan. Tujuan utama program tersebut adalah mengedukasi masyarakat akan pentingnya mengelola dan memilah sampah di rumah dan untuk mengurangi produksi sampah ke TPA. Karena belakangan ini terjadi beberapa kejadian kebakaran di TPA yang disebabkan tercampurnya sampah organik dan anorganik dan kapastias tampung TPA sudah melebihi dari standar yang ditetapkan sehingga menghasilkan gas metan yang dapat menyebabkan kebakaran. Oleh sebab itu, terdapat 4 strategi dalam mencapai tujuan utama meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:

### 1. Collaborative Governance

Ada dua sudut pandang mengenai paradigma governance, yaitu sudut pandang deskriptif dan perspektif (chandoke dalam Shylendra, 2007). Dilihat dari sudut pandang deskriptif, paradigma *governance* merupakan fenomena yang muncul di negara maju dan negara berkembang untuk merespons keterbatasan peran yang dimiliki oleh pemerintah. Di negara maju, konsep *welfare state* telah memudar

karena telah munculnya ideologi neo liberal. Globalisasi menyebabkan perubahan tersebut menular hingga ke negara berkembang. Ada tekanan bagi pemerintah untuk melibatkan aktor lain dalam program Pembangunan. Hasilnya, negara-negara di dunia menjadi lebih plural dengan hadirnya berbagai aktor lain dalam program Pembangunan dari tingkat lokal sampai global. Aktor-aktor tersebut berupaya melengkapi peran yang sudah dilakukan pemerintah, bahkan ada juga yang menggantikan peran pemerintah sebagai aktor tradisional dalam Pembangunan. Dalam paradigma governance, ada tiga aktor (*Government, private sector, civil society*) yang berperan dalam pembangunan. Pemerintah mulai mengikutsertakan aktor nonpemerintah sektor swasta dan masyarakat madani dalam program Pembangunan. Kapasitas ketiganya dibutuhkan untuk saling melengkapi kapasitas aktor lain yang biasa disebut dengan kolaborasi. Secara filosofis, kolaborasi merupakan Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Schrage dalam Harley dan Bisman, (2010: 18), kolaborasi merupakan Upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi membutuhkan berbagai macam aktor-baik individu maupun organisasi yang bahu-membahu mengerjakan tugas demi tercapainya tujuan Bersama. Maka, collaborative governance merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Donahue dan Zekhauser (2011:4), *collaborative governance* merupakan kondisi yang mana pemerintah untuk memenuhi tujuan publik melalui kolaborasi antar organisasi maupun individu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli dapat disimpulkan bahwa collaborative governance merupakan proses dari struktur jejaring muti organisasi lintas sectoral (*government, private sector, civil society*) yang membuat kesepakatan Bersama, keputusan Bersama, pencapaian consensus melalui interaksi formal maupun informal pembuatan dan pengembangan norma-norma dalam interaksi yang bersifat saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, di dalam kolaborasi interaksi yang muncul bersifat egaliter yaitu seluruh aktor mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam hal pencapaian tersebut untuk mencapai target program Kang Pisman dilakukan kerja sama dengan berbagai pihak karena akan memberikan dampak yang saling menguntungkan. Salah satu target program Kang Pisman adalah Masyarakat diajak ikut serta untuk Bersama bekerja menanggulangi masalah sampah dari mulai lingkungan terkecil yaitu dari rumah sendiri.

Kolaborasi dan partisipasi masyarakat merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus bersinergi untuk mencapai tujuan pembangunan mengingat dalam mencapai tujuan Pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar sedangkan jumlah pendapatan asli daerah terbatas sehingga pemerintah daerah harus mencari alternatif untuk membiayai Pembangunan yang semakin besar. Pada tahun 2022, tingkat partisipasi swadaya masyarakat dalam Pembangunan Kota Bandung menunjukkan nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 193 Miliar. Selain itu, dari 2019-2022 prioritas Pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR mencapai Rp 82 Miliar. Perbandingan antara target dan realisasi program/agenda Prioritas Pembangunan yang diselesaikan melalui swasta (Kerjasama pemerintah dan badan usaha/KPBU, Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah/PINA, hibah dan lain sebagainya). Permasalahan lainnya yaitu terkait *tipping fee* (biaya yang harus disetorkan dari pemerintah Kota Bandung kepada pemerintah provinsi Jawa Barat selaku pemilik TPA). Saat ini Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan dana hingga Rp. 31 miliar dalam setahun guna memenuhi *tipping fee*, biaya dampak negatif, serta biaya transportasi pengangkutan sampah ke TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Biaya tahunan itu merujuk pada *tipping fee* sampah sebesar Rp. 50 ribu per ton serta biaya dampak negatif pembuangan sampah sebesar Rp. 11.250 per ton

sampah. Dengan adanya Kang Pisman dapat mengurangi biaya *tipping fee* karena beban sampah yang diangkut ke TPA berkurang serta menciptakan cakupan layanan persampahan mencapai 97,9%.

Dengan adanya permasalahan sampah tersebut maka dibutuhkan suatu inovasi penanganan yaitu dengan Kang Pisman. Dilihat dari programnya kang pisman dai pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah tersebut, pengurangan sampah meliputi pembatas timbulan sampah, pendaur ulang sampah; dan atau pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan peananganan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b meliputi: pemilahan dalam bentuk pengelompokkan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir, pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengambilan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke mendia lingkungan secara aman.

Contoh kolaborasi diantara dinas yang dilakukan dalam pengelolaan sampah diawali dengan edukasi Kerjasama dengan dinas pendidikan. Dinas Pendidikan Membuat sekolah adiwiyata, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kesadaran siswa sekolah akan pentingnya pengelolaan sampah mulai dari pemilahan sampah sampai dengan pemanfaatan kembali sampah. Bukti suksesnya sudah berjalannya program ini yaitu dengan diberikannya penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait sekolah adiwiyata terbaik kepada 5 SD di Kota Bandung pada tahun 2023. Terdapat juga "Sekolah Kang Pisman". Sekolah ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya memilah sampah mengolah sampah di sumber dan merubah sampah mejadi sesuatu yang bernilai ekonomi yang diperuntukan untuk warga Kota Bandung maupun warga yang berdomisili di Kota Bandung. Namun sekolah ini juga membuka peluang warga kota lain yang ingin mempelajari pengelolaan sampah. Di sekolah Kang Pisman para siswa diajarkan berbagai macam proses pengolahan sampah, seperti *biodigester*, ayam petelur, maggot BSF, ayam kampung biofolk (kolam lele), drum komposter, bata terawang, Loseda (Lodong Sesa Dapur), *waste fo food area*, ruang kelas, bank sampah, dan galeri. Kang Pisman juga bekerjasama dengan Diskominfo dalam mempromosikan program ini secara luas dan masif kepada masyarakat di seluruh Kota bandung. Selain itu dapat menjadi sarana edukasi untuk melalui media sosial seperti youtube, Instagram, facebook dan media sosial lainnya. Selain itu, program kang pisman juga bekerja sama dengan dinas ketahanan pangan untuk penyediaan bibit tanaman dan bibit ternak seperti lele dan ayam sayuran seperti bayam dan buncis. Nama program tersebut adalah Buruan Sae yang merupakan kepanjangan dari Sehat, Alami dan Ekonomis. Buruan SAE merupakan program yang berbentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk menjadikan masyarakat lebih mandiri dalam memproduksi kebutuhan pangannya sendiri sehingga makanan yang dikonsumsi dapat lebih sehat, alami, dan ekonomis, serta dapat menciptakan tata Kelola lingkungan yang baik. Saat ini, terdapat 195 lokasi Buruan SAE yang telah terdaftar pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung.

Program Kang Pisman juga bekerjasama dengan bank sampah Induk Kota Bandung dan beberapa pihak swasta untuk menjual hasil olahan *urban farming*. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup

Kota Bandung juga melakukan kerja sama dengan PT. Pegadaian untuk mendapatkan emas dari hasil penjualan sampah plastik nasabah bank sampah.

*Collaborative governance* melalui program kang pisman juga dilakukan melalui kegiatan Tindakan penegakan hukum. Terkait Tindakan pelanggaran Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat, Kerjasama dilakukan antara dinas LH dengan Satpol PP Kota Bandung untuk menindak pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan, masyarakat diharapkan dapat melaporkan kepada satpol pp melalui foto atau video apabila ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Dan ini sudah berjalan jadi bekerjasama juga dengan pengadilan apabila ada warga yang tertangkap membuang sampah sembarangan maka akan langsung diproses secara hukum. Dalam perjalanannya, program ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh berbagai pihak. Program Kang Pisman sendiri sudah bekerjasama dengan banyak tempat komersial untuk turut serta menyukseskan program ini. Beberapa mitra komersial seperti Mall, supermarket dan hotel.

## 2. *Community Development*

Pengembangan masyarakat (*Community Development*) menurut Jim Ife dan Longman (1995) merupakan konsep yang berkembang sebagai tandingan terhadap konsep Negara kesejahteraan. Jim Ife dan Longman menyebutkan bahwa: “Konsep pengembangan masyarakat lebih menekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri (*community based services*) dengan ide utama keberlanjutan dalam penyelenggaraan kebutuhan hidup manusia karena dikembangkannya keswadayaan (*self reliance*). Ada tiga karakter umum program pengembangan masyarakat, yaitu: 1. Berbasis masyarakat (*community-base*) atau masyarakat sebagai pelaku utama atau subyek dalam perencanaan dan pelaksanaan program 2. Berbasis sumberdaya setempat (*local resources-base*), yaitu penciptaan kegiatan dengan melihat potensi sumberdaya (alam, manusia) yang ada. 3. Berkelanjutan (*sustainable*) yaitu program berfungsi sebagai penggerak awal pembangunan yang berkelanjutan.

### A. Berbasis masyarakat

Di dalam program kang pisman terdapat suatu konsep pengembagnan yaitu adanya Kawasan Bebas Sampah. Merupakan suatu usaha dari Dinas LH dengan model pendampingan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pengelolaan sampah. Pendampingan dari dinas LH menunjukan satu orang dari setiap RW untuk menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai koordinator untuk menggalangkan kegiatan dan juga mengedukasi terkait pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pembentukan KBS ini lebih sulit untuk kalangan masyarakat menengah ke atas karena mereka selalu bertindak pragmatis terkait sampah. Masyarakat hanya mengandalkan petugas sampah untuk mengangkut sampah karena mereka merasa sudah membayar iuran sampah setiap bulannya. Dengan adanya edukasi *door to door* maka kegiatan ini pun berjalan cukup efektif dan di setiap ada perkumpulan seperti arisan RW sampai RT maka akan selalu diedukasi terkait dengan program kang pisman ini. Pendekatan di setiap kelurahan pun berbeda beda. Seperti contohnya di kelurahan antapani Tengah, Pak Lurah selaku pemimpin wilayah selalu menjadwalkan untuk mengumpulkan sampah dari titik kooridnasi di setiap RT menuju ke KBS setiap dua kali dalam satu minggu. Yang bergerak dalam kegiatan pengumpulan sampah tersebut adalah KSM selaku koordinator di setiap RW. Kegiatan ini cukup berjalan efektif karena dengan adanya

kegiatan *door to door* serta pendekatan melalui rapat atau arisan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

B. Berbasis sumberdaya setempat

Pada setiap kelurahan terdapat beberapa sumber daya yang menjadi dasar pada pembentukan sebuah komunitas. Penerapan Kawasan Bebas Sampah-Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (KBS-RTPS) Kelurahan merupakan kolaborasi antara DLHK Kota Bandung, kelurahan dan Lembaga RW. Dalam eksekusi di lapangan, KBS-RTPS ini didukung oleh Tim Pendamping Kelurahan (Manajer Kelurahan, PKBS, PES, OS), PJ Kelurahan, dan Petugas Pengumpul Sampah. Manajer Kelurahan berada langsung di bawah komando Stakeholder DLHK dan berkoordinasi dengan stakeholder kelurahan melalui PJ Kelurahan. Manajer Kelurahan mengorganisir dan memonitor kegiatan yang dilakukan oleh Pendamping Kawasan Bebas Sampah (PKBS), Petugas Pengangkut Sampah Organik (PES), dan Petugas Pengolah Sampah Organik (OS). Manajer Kelurahan berkoordinasi langsung dengan Lembaga RW, terutama mengenai pelaksanaan kegiatan Tim pendamping kelurahan di lapangan dan petugas pengumpul sampah. Manajer Kelurahan memonitor kegiatan petugas pengumpul sampah melalui PKBS. Peran Tim Pendamping kelurahan dalam penerapan KBS-RTPS kelurahan ini adalah membangun dan memulai sistem pengelolaan sampah terpilah di dalam Kawasan, atau program Kang Pisman, sesuai dengan perencanaan di dalam RTPS. Sumber daya yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh DLH Kota Bandung dalam pelaksanaan RTPS ini termasuk juga bibit tanaman dan ikan dari Dinas Ketahanan pangan dan pertanian Kota Bandung. Hasil dari olahan urban farming tersebut digunakan untuk operasional kegiatan pengelolaan sampah di kelurahan dan digunakan untuk menggaji petugas sampah yang dibiayai oleh RT setempat. Selain itu dapat digunakan juga sebagai sarana edukasi dan sosialisasi kepada pemerintah daerah atau pihak lain yang ingin belajar pengelolaan sampah.

C. Sustainability

Di dalam RTPS terdapat tahapan untuk melaporkan kegiatan implementasi KBS RTPS secara berkala. Laporan ini terdiri dari 4 jenis, yakni Laporan Mingguan, Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Akhir Tahun. Selain melaporkan hasil kegiatan, Tim Pendamping Kelurahan diharapkan dapat memberikan Analisa dan evaluasi atas kegiatan implementasi yang telah dilakukan, untuk menjadi perbaikan kinerja selanjutnya. Contoh gambaran kegiatan laporan mingguan, laporan data berat sampah organik harian terangkut dari titik kumpul, laporan data berat sampah anorganik daur ulang dari setiap petugas pengumpul sampah, laporan data sampah residu/tercampur ke TPS dari setiap Petugas Pengumpul Sampah, laporan data sampah organik terolah di sarana pengolahan dalam dan luar Kawasan, laporan kegiatan harian lainnya dan dokumentasi foto. Dengan adanya laporan yang diterbitkan maka akan menjadi bahan pertimbangan untuk menciptakan program berkelanjutan kedepannya. Contohnya dari KBS bisa bekerjasama lebih massif lagi dengan pihak swasta yang ingin bekerjasama dalam pengelolaan sampah selain itu menambah lagi jumlah warga yang aktif dalam program Kang Pisman sehingga program ini dapat terus berkembang dan terus berjalan.

3. *Circular Economy*

Berdasarkan definisi dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin, 2021), prinsip utama yang terdapat pada ekonomi sirkular adalah 5R, yaitu *Reduce, Reuse, Recycle, Recovery* dan

*Repair*. Lima prinsip tersebut dapat dilakukan melalui pengurangan pemakaian material mentah dari alam (*reduce*), optimasi penggunaan material yang dapat digunakan kembali (*reuse*), penggunaan material hasil dari proses daur ulang (*recycle*), dari proses perolehan kembali (*recovery*), maupun dengan melakukan perbaikan (*repair*).

Permasalahan. Penerapan ekonomi sirkular berpotensi menghasilkan tambahan PDB Sebesar 593-638 triliun di tahun 2030. Pengolahan sampah berbasis sirkular ekonomi juga berpotensi meningkatkan tambhana pekerjaan di tahun 2030. Dari aspek lingkungna, ekonomi sirkular berpotensi membantu kontribusi Indonesia dalam pengurangan gas emisi pada tahun 2030. Pengolahan sampah juga berpotensi besar sebagai substitusi bahan baku produksi sebagai sumber energi.

**Tabel 1.1 Sektor Potensial dalam Penerapan Ekonomi Sirkular**

Sektor	PDB di 2019 (IDR triliun)	Persentase	Tenaga Kerja di 2019 (juta)	Persentase
Makanan dan Minuman	1.014	9,3%	13.1	10,1%
Tekstil	146	1,3%	1,2	0,9%
Konstruksi	1.108	10,1%	7,6	5,9%
Perdagangan besar & eceran	1.168	10,7%	19,8	15,3%
Peralatan listrik	204	1,9%	1,6	1,3%

Sumber: Bappenas, 2021

Berdasarkan grafik diatas, Lima sektor utama yang difokuskan untuk Pengembangan ekonomi sirkular dari sampah, yang saat ini berkontribusi Sebesar 33% terhadap PDB dan memperkejakan lebih dari 43 juta jiwa di Indonesia.

Di dalam program kang pisman kegiatan sirkular ekonomi sudah berjalan bagaimana warga bisa mengolah sampah baik organik maupun anorganik. Contohnya adalah dari sampah hasil sisa makanan dengan teknologi penimbunan tanah dalam waktu 2 hari bisa diolah menjadi kompos. Kompos itu kemudian menjadi media tanam untuk menanam sayuran seperti pokcoy, kangkung dan bayam. Kemudian sayuran itu nantinya bisa dijual ke pasar atau ke masyarakat itu sendiri di lingkungan kelurahan selaku *offtaker*. Contoh lainnya adalah dengan metode magot. Magot digunakan sebagai pengurai sampah organik yang kemudian magot itu bisa digunakan sebagai pakan ayam petelur atau pakain ikan lele. Harga 1 kg magot Hasilnya lele dan ayam petelur lebih sehat dari pada lele dan ayam petelur konvensional karena pakannya berasal dari bahan organik. Ikan lele dan telur yang sudah siap panen akan dijual ke pasar dan masyarakat di sekitar kelurahan atau sesuai permintaan dari warga. Yang kedua adalah sampah anorganik seperti plastic, kaca, potongan besi, potongan tembaga, kayu, dan lain-lain. Untuk sampah anorganik setelah dipilah di rumah tangga akan disetorkan ke bank sampah di kelurahan. Warga yang berada di kelurahan merupakan nasabah dari bank sampah di setiap kelurahan. Setelah disetorkan ke bank sampah maka bank sampah akan memberikan reward atau poin sesuai dengan klasifikasi dan jenis sampah plastic yang bisa diolah. Setelah mengumpulkan *reward* dan mencapai target tertentu maka nasabah bank sampah akan mendapatkan emas.

#### 4. Pendekatan *governance* berbasis digital

Saat ini pengguna media sosial telah mengalami peningkatan secara signifikan. Dengan adanya media sosial, dapat membantu dinas pemerintah untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Hal ini diketahui dengan adanya akun media sosial pada situs *web* resmi dair instansi pemerintah atau program dari pemerintah. Berdasarkan penelitian lain telah teridentifikasi lima jenis penggunaan media sosial dalam organisasi yaitu yang pertama siaran, menggunakan media sosial untuk penyiaran informasi yang searah dan dapat menjangkau seluruh pengguna mendapatkan pesan informasi. Kedua dialog, menggunakan media sosila untuk memfasilitasi dialog antar pengguna internal dan eksternal. Ketiga, manajemen pengetahuan menggunakan media sosial untuk penyimpanan, pemeliharaan, dan pengambilan pengetahuan. Keempat kolaborasi, menggunakan media sosial untuk melakukan aksi dan kerja Bersama dari hasil yang ditentukan. Terakhir sosialisasi, menggunakan media sosial untuk menghasilkan hubungan dan kesetiaan antar pengguna (Scslagwein dan Hu, 2017).

Dalam program Kang Pisman terdapat sebuah sistem yang terintegrasi dengan pendekatan digital. Di dalam *platform* tersebut bertujuan untuk memberitakan hasil dari program kang pisman dan melakukan promosi, sosialisasi dan edukasi. Selain *platform* yang dapat diupload dari *website* ada juga media sosial lain yang digunakan untuk promosi seperti dari Instagram, youtube dan media sosial lainnya seperti *facebook*.

## PENUTUP

Berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kang pisman di Kota Bandung telah sukses dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilaksanakannya 4 strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program kang pisman. Dimana, sudah terjalinnnya kerja sama yang baik antar *stakeholder* pemangku kepentingan program kang pisman yaitu pemerintah, masyarakat, dan *public sector*. Dinas Lingkungan Hidup selaku Pembina program kang pisman telah berhasil membina masyarakat dengan menciptakan RTPS di 8 Kelurahan di Kota Bandung. Selain itu masyarakat sudah mandiri dalam kegiatan pemilahan sampah serta menerapkan proses 3R (*reduce, reuse, recycle*) terutama di rumah tangga. Kemudian, dalam hal *community development* sudah terbentuk komunitas di kelurahan untuk pengelolaan sampah yang disebut dengan Kawasan Bebas Sampah (KBS). Di dalam KBS tersebut juga sudah berjalan pengolahan dari sampah yang sudah terpilah seperti sampah anorganik dan sampah organik.

Contohnya dari sampah anorganik yaitu sampah plastik, kayu, dan besi yang sudah terpilah akan disetorkan kepada bank sampah yang berada di KBS atau bank sampah unit yang ada di kelurahan dan untuk sampah organik akan dikumpulkan ke KBS di Kelurahan dan akan diolah menjadi kompos, pakan ikan serta menciptakan *urban farming* yang terintegrasi. Dari sisi *circular economy* hasil dari olahan sampah organik yaitu hasil ternak lele dan penjualan telur ayam akan dijual ke pasar atau ke masrakat di sekitar kelurahan dan akan menciptakan keuntungan untuk operasional dari KBS itu sendiri maupun untuk meningkatkan pendapatan dari warga yang terlibat dan aktif dalam program Kang Pisman. Terakhir, terkait dengan pendekatan *governance* dari sisi digital kang pisman juga melakukan promosi melalui media sosial untuk lebih meluaskan sosialisasi dan edukasi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di beberapa Kelurahan yang belum menerapkan kang pisman di Kota Bandung.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, Isbandi Rukminto. (2012) *Intervensi komunitas: Pengembangan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2019) *Kesejahteraan sosial: Pekerjaan sosial, pembangunan sosial, dan kajian pembangunan. suatu pengantar. Edisi Kedua*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Alita, T. (2020) Analisis Komitmen Bank Sampah Unit Terhadap Program Kang Pisman. *Jurnal e-proceeding of Management*. Vol.7 Hal 2051
- Al-Amin, Muhammad. (2021) Sosialisasi dan Edukasi Gerakan Kang Pisman melalui Program Wate To Food. Vol: 1 No: XLIII
- Anwar, Rully. (2020) Strategi Kampanye “Kang Pisman” pada Media Luar Ruang di Wilayah R rekreasi Kota Bandung. *Jurnal of Tourism Destination and Attraction*. Volume 8 No.2 Desember 2020, E-ISSN: 2685-6026.
- Awang, A., & Wijaya, M. (2012). *Ekologi pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2021) *Sustainable and Resilient from the Covid -19 Pandemic for the Achievement of the 2030 Agenda*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Bryman, A. (2014) *Social research methods (Fourth Edi)*. Oxford University Press, Inc.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980) Participation’s place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Fedryansyah, M. (2016) Kebijakan sosial dalam pembangunan. *Share: Social Work Journal*, 6(1).
- Gumilar A. (2022) Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Program Pengelolaan Sampah Kang Pisman di Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung. (Studi Kasus: RW. 09). *Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2022*.
- Ida, I (2021) Pendampingan Komunitas Masyarakat Sukajadi Dalam Mengedukasi Nilai Guna Sampah Menjadi Berkah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Volume 7 (03) September 2021.
- Hidayatulloh I, (2021) Dualitas Agen dan Struktur Dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus tentang Pelaksanaan Program Kang Pisman di Kecamatan Cibiru, Kota Bandung). *Journal Sosiologi Nusantara*. Vol. 7 No 1 Tahun 2021 hal 117.
- Ife, Jim & Tesoriero, Frank. (2008) *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Edisi 3. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ife, J. (2013). *Community development in an uncertain world (First Edit)*. Cambridge University Press.
- Iqbal, M (2018) Identifikasi Penerapan Konsep Zero Waste dan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah di Kampung Kota Kampung Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kota Bandung. *Jurnal Wilayah dan Kota*. Vol 06 No 02.

- Istanto, D (2020) Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Bank Sampah (Studi Kasus Pada Kelompok Masyarakat Pengelola dan Nasabah Bank Sampah warga Manglayan RW.06 Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. *Social Work Journal*. Volume 11: hal. 41-50.
- Khaz, F. (2014) Pemberdayaan industri kecil dan menengah dalam pasar untuk mengatasi pencari kerja di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2014. *JOM 72 FISIP*, Vol. 4(No. 1, Februari 2017), Hal 1-14
- Kurniawati, dkk (n.d.) Pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Administrasi Publik (JAP)*, vol. I
- Midgley, James (1995) *Social sevelopment: The developmental perspective in social welfare*. London: Sage Publikations Ltd.
- Midgley, James. (2013) *Social development: Theory and practice*. London: Sage Publikations Ltd.
- Muslim, A. (2007) Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. VIII, 104-113.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. In *teaching sociology*, Vol. 30, Issue 3.
- Patton, M.Q. (1990) *Qualitative evaluation and research methods*. London: Sage Publications.
- Pekasih, Cipta (2022) Collaborative Governance Dalam Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan) Untuk mengatasi Permasalahan Sampah di Kota Bandung. *Journal of Digtan Society*. Vol 1 No. 1 2022.
- Pratama, A. (2021) Peran Bank Sampah Bumi Inspirasi Sebagai Upaya Memberdayakan Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Kang Pisman. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Volume 8 (1): 1-17.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2014) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. *Jurnal Aspirasi*. Vol 5 Nomor 1, Juni 2014.
- Rachman, E. S., & Noviyanto, B. (2017) Pemanfaatan e-government pada Desa Wonokarto untuk meningkatkan akurasi dan informasi potensi desa. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 8(1), 45-50.
- Schlagwein, D. and Hu, M. (2017) How and Why organisations use social media: Five use types and their relaitons to absorptive capacity'. *Journal of Information E. S., & Noviyanto, B. (2017). Pemanfaatan e-government pada Desa Wonokarto untuk meningkatkan akurasi dan informasi potensi desa. Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 8(1), 45-50.
- Suryono, Agus. (2010) *Dimensi-dimensi prima teori pembangunan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sumodingrat, G. (1999) *Pemberdayaan masyarakat dan jaring pengaman sosial*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharto, S. (2007) Pengembangan materi dan kegiatan pembelajarannya dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan bidang seni musik. *Harmonia: Journal Of Arts Research And Education*, 8(3).

- Muslim, A. (2007) Pendekatan partisipatif dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* Vol. VIII, 104-113.
- Ndoa, L. (2022) Implementasi Kebijakan E-Government dalam pengelolaan Sampah Melalui Aplikasi Kurangi, Pisahkan, Manfaatkan Sampah (Kang Pisman) Mobile di Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. *Journal of Governance and Local Politics*. Vol. 4 No. 2, November: 2022 pp. 176-187.
- Setyaningsih, Putri. (2022) Inovasi Pengelolaan Sampah Pada Program Kurangi, Pisahkan dan Manfaatkan (Kang Pisman) oleh TPS Babakan Sari dan TPS Tegallega Pada Perusahaan daerah Kebersihan Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara* Vol 13 Number 2 Hal. 257-263.
- Wijaya, M., & Handrisal, H. (2021). Local Government Efforts in Encouraging the Existence of Subsistence Agriculture as an Alternative to the Supply of Food Needs in Lingga Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(3), 7000-7012.
- Yuanita, P (2020) Evaluasi Efektivitas Program Kang Pisman di Kelurahan Sukaluyu dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Teknologi Ramah Lingkungan*. Volume 4 Nomor 2 Juli 2020.
- Zastrow, Charles (2010) *Introduction to social work and social welfare*. Tenth Edition. Belmont: Brooks/Cole Cengage Learning.
- Zulfa, Salma. (2022) Pengelolaan Sampah Organik di Kota Bandung: Suatu studi tentang Efektivitas Program Kang Pisman di Kelurahan Sukamiskin. *Jurnal Administrasi Negara*. Volume 14 Number 1 Hal. 116 - 118.